

LAPORAN STATISTIK TAHUN 2015

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA



**BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI REMU RANSIKI
PAPUA BARAT**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku Statistik Pembangunan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Remu Ransiki Tahun 2015 merupakan database pembangunan kehutanan di Provinsi Papua Barat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan data tentang sumber daya hutan dan pembangunan di sektor kehutanan selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2011 s.d 2015. Dengan adanya kesinambungan penerbitan, diharapkan buku Statistik Pembangunan BPDAS Remu Ransiki ini dapat memberikan informasi secara “*Time Series*”

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga buku ini diterbitkan, disampaikan ucapan terimakasih. Saran-saran untuk perbaikan pada penerbitan-penerbitan yang akan datang sangat kami harapkan.

Harapan kami semoga buku Statistik Pembangunan ini dapat bermanfaat.

Manokwari, Februari 2015
KEPALA BALAI,

Ir. Djarot Prihambodo, M.Si
NIP. 19670201 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
II. ORGANISASI	
A. Visi dan Misi	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
C. Struktur Organisasi	4
D. Sumber Daya Manusia.....	6
III. KONDISI UMUM	
A. Letak dan Luas.....	8
B. Penggunaan dan Penutupan Lahan	9
C. Kekritisian Lahan / DAS	10
D. Jenis Tanah dan Topografi	11
IV. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2011 S/D 2015).....	13
LAMPIRAN	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Personil BPDAS Remu Ransiki Berdasarkan Golongan dan Teknis Pendidikan	6
Tabel 2. Letak dan Luas Kabupaten/Kota di wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki	8
Tabel 3. Penggunaan Lahan di Wilayah Kerja BPDAS Remu Ransiki Tahun 2015	9
Tabel 4. Kelerengan Lahan di wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki	12
Tabel 5. Realisasi Kegiatan BPDAS Remu Ransiki 5 Tahun terakhir (2011-2015)	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPDAS Remu Ransiki Tahun 2015	5
Gambar 2. Persentase Personil BPDAS Remu Ransiki Tahun 2015	7

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Persentase Lahan Kritis berdasarkan Kekritisan Lahan	10
Grafik 2. Reboisasi di Dalam Kawasan Hutan	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.1. Wilayah Kerja BPDAS Remu Ransiki	I.1-1 s.d 61
Lampiran I.2. Luas dan Tingkat Kekritisan Lahan	I.2-1 s.d 57
Lampiran I.2.1.Rekapitulasi Luas dan Tingkat Kekritisan Lahan.....	I.2.1-1
Lampiran I.3. Penetapan DAS Prioritas	I.3-1
Lampiran I.4. Penutupan Vegetasi	I.4-1 s.d 26
Lampiran I.5. Kejadian Bencana Alam Banjir	I.5-1
Lampiran I.6. Kejadian Bencana Alam Longsor	I.6-1
Lampiran I.7. Keadaan Iklim di Wilayah Kerja BPDAS Remu Ransiki Tahun 2015	I.7-1
Lampiran I.8. Keadaan dan Debit Sungai-Sungai Besar	I.8-1
Lampiran. I.9. Keadaan Danau/ Telaga dan Waduk/ Bendungan	I.9-1
Lampiran I.10.1. Topografi	I.10-1 s.d 38
Lampiran I.10.2. Jenis Tanah	I.10.2-1 s.d 10
Lampiran I.11. Penyusunan Pola RTK RHL, RP RHL dan RTn RHL.....	1.11-1 s.d 7
Lampiran II. 1. Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	II.1-1
Lampiran II. 2. Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	II.2-1
Lampiran II. 3. Data Pegawai Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	II.3-1
Lampiran III. Penyusunan Rencana Kegiatan Bidang Rehabilitasi Lahan dan Hutan Lindung	III.1-1
Lampiran IV.1.1. Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Rehabilitasi	IV.1.1-1
Lampiran IV.1.2. Rencana dan Realisasi Rehabilitasi Lahan Kawasan Lindung	IV.1.2-1
Lampiran IV.2.1.1. Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Pembuatan/Pengembangan Pengelolaan Hutan Rakyat dan Pembuatan Hutan/Kebun Rakyat.....	IV.2.1.1-1
Lampiran IV.2.1.2. Rencana dan Realisasi Pembuatan Areal Model Pengelolaan Hutan Rakyat.....	IV.2.1.2-1
Lampiran IV.2.1.3. Rencana dan Realisasi Pembuatan Areal Model Pengelolaan Hutan Rakyat (Fungsi Produksi).....	IV.2.1.3-1
Lampiran IV.2.1.4. Rencana dan Realisasi Pembuatan Areal Model Pengelolaan Hutan Rakyat (Fungsi Lindung).....	IV.2.1.4-1
Lampiran IV.2.2. Rencana dan Realisasi Pembuatan Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam (UP-UPSA)...	IV.2.2-1
Lampiran IV.2.3. Rencana dan Realisasi Pembuatan Unit Percontohan Usaha Pertanian Menetap (UP-UPM).....	IV.2.3-1
Lampiran IV.2.4. Rencana dan Realisasi Pembuatan Tanaman Turus Jalan	IV.2.4-1
Lampiran IV.2.5. Rencana dan Realisasi Pembuatan Hutan Kota	IV.2.5-1
Lampiran IV.2.6. Rencana dan Realisasi Rehabilitasi Hutan Mangrove	IV.2.6-1
Lampiran IV.2.7.1.1. Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Penanaman Tanaman Gaharu	IV.2.7.1.1-1
Lampiran IV.2.7.1.2. Rencana dan Realisasi Pembuatan Model Tanaman Gaharu.....	IV.2.7.1.2-1

Lampiran IV.2.7.2.1. Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Pembuatan/Pengembangan Budidaya Buah Merah	IV.2.7.2.1-1
Lampiran IV.2.7.2.2. Rencana dan Realisasi Pembuatan/Pengembangan Budidaya Buah Merah	IV.2.7.2.2-1
Lampiran IV.2.7.3.1. Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Pembuatan/Pengembangan Perlebahan	IV.2.7.3.1-1
Lampiran IV.2.7.3.2. Rencana dan Realisasi Pembuatan Model Perlebahan	IV.2.7.3.2-1
Lampiran IV.2.8. Rencana dan Realisasi Pembangunan Dam Pengendali	IV.2.8-1
Lampiran IV.2.9. Rencana dan Realisasi Pembangunan Sumur Resapan.....	IV.2.9-1
Lampiran V.1. Rencana dan Realisasi Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Tahun 2011	V.1-1 s.d 5
Lampiran V.2. Rencana dan Realisasi Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2012	V.2-1 s.d 5
Lampiran V.3. Rencana dan Realisasi Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2013	V.3-1 s.d 6
Lampiran V.4. Rencana dan Realisasi Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2014	V.4-1 s.d 3
Lampiran V.5. Rencana dan Realisasi Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2015	V.5-1
Lampiran V.6. Rencana dan Realisasi Bantuan Bibit yang diterima masyarakat dalam rangka Seed For People (Penghijauan lingkungan/penanaman swadaya).....	V.6-1
Lampiran V.7. Rencana dan Realisasi Pembuatan Hutan Desa Tahun 2011 – 2015	V.7-1
Lampiran VI.1.1. Rencana Dan Realisasi Terbentuknya Kelompok Tani	VI.1.1-1
Lampiran VI.1.2. Rencana dan Realisasi Pelatihan Petani.....	VI.1.2-1
Lampiran VI.2. Terbentuknya Forum DAS.....	VI.2-1
Lampiran VI.3. Terbentuknya DAS Terpadu	VI.3
Lampiran VII.1. Kelembagaan Kegiatan Bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	VII.1
Lampiran VIII.1. Kegiatan BLM-PPMPBK/Bansos di Wilayah Kerja BPDAS Remu Ransiki Tahun 2011	VIII.1-1 s.d 2
Lampiran VIII.2. Kegiatan BLM-PPMPBK/Bansos di Wilayah Kerja BPDAS Remu Ransiki Tahun 2012	VIII.2-1 s.d 2
Lampiran VIII.3. Kegiatan BLM-PPMPBK/Bansos di Wilayah Kerja BPDAS Remu Ransiki Tahun 2013	VIII.3-1 s.d 2
Lampiran VIII.4. Kegiatan BLM-PPMPBK/Bansos di Wilayah Kerja BPDAS Remu Ransiki Tahun 2014	VIII.4-1
Lampiran VIII.5. Kegiatan BLM-PPMPBK/Bansos di Wilayah Kerja BPDAS Remu Ransiki Tahun 2015	VIII.5-1
Lampiran IX.1. Data Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS)	IX.1-1
Lampiran IX.2. Luasan Rawan Banjir Limpasan	IX.2-1
Lampiran IX.3. Luasan Rawan Longsor	IX.3-1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki (BPDAS Remu Ransiki) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDAS & HL). Wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki mencakup seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Barat dan sebagian Kabupaten di Provinsi Papua dengan luas mencapai 100.203 Km² (10.023.541,30 ha). Wilayah ini adalah kawasan yang memiliki ± 80 % hutan yang masih utuh dan tergolong sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman jenis (biodiversity) yang tinggi. Selain kawasan hutan yang luas, keanekaragaman jenis yang tinggi, Papua Barat juga memiliki keanekaragaman budaya yang banyak, dengan hak-hak atas sumber daya secara adat yang beragam pula. Oleh karena itu pembangunan sumber daya alam hutan dan ekonomi di wilayah Papua Barat harus terintegrasi dan saling memberikan manfaat dengan memperhatikan aspek ekosistem, ekologis dan sosial.

BPDAS Remu Ransiki mempunyai tugas melaksanakan pembangunan kehutanan di bidang Rehabilitasi Hutan (RHL) baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Untuk pelaksanaan tugas dimaksud, maka ketersediaan data dan informasi kegiatan pembangunan bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang akurat, tepat waktu, relevan, konsisten dan lengkap sangat diperlukan dalam proses perencanaan/perumusan kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, disusun buku data base mengenai data-data pembangunan kehutanan dalam kurun waktu tertentu di wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki. Kegiatan mendata dan menginventarisir kegiatan pembangunan kehutanan bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung yang dilakukan setiap tahun dan pada umumnya terdiri dari kegiatan yang bersifat *incremental* (data dapat dijadikan *time series*) serta kegiatan insidental (berupa data parsial), maka agar dapat didokumentasikan secara tertib dan informatif perlu dibuat ke dalam Buku Statistik.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Buku Statistik Pembangunan Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki Tahun 2015 dimaksudkan memenuhi kebutuhan data dan informasi pembangunan bidang Hutan Lindung dan Perhutanan Sosial yang dilaksanakan dalam wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki (Provinsi Papua Barat dan sebagian Provinsi Papua) secara *time series* selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Buku Statistik Pembangunan Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki Tahun 2015 supaya hasil pembangunan RHL dapat dilaporkan dan terdokumentasikan dengan baik serta menjadi bahan evaluasi atau dasar kebijakan pembangunan kehutanan di tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Buku Statistik Pembangunan Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki Tahun 2015 memuat organisasi satker BPDAS Remu Ransiki, kondisi umum wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki, kepegawaian satker BPDAS Remu Ransiki, perencanaan bidang Rehabilitasi dan realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dari tahun 2011 s/d 2015.

II. ORGANISASI

A. Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2015-2019

Visi

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Selanjutnya seluruh jajaran kementerian dan lembaga dalam merancang arah pembangunan menggunakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Presiden. Visi Pembangunan Nasional telah ditetapkan oleh Presiden RI. Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Adapun visi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Remu Ransiki memiliki adalah optimalisasi fasilitasi pembangunan pengendalian DAS dan Hutan Lindung dalam mendukung peningkatan fungsi DAS dan kesejahteraan masyarakat.

Misi

Misi yang diemban oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Remu Ransiki adalah :

- a. Memantapkan kebijakan bidang PDASHL
- b. Memperkuat kapasitas kelembagaan bidang PDASHL
- c. Mendorong pelaksanaan pemulihan fungsi hutan dan lahan di DAS Prioritas berbasis pemberdayaan masyarakat

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor : P.15/Menhut-II/2007 tanggal 4 Mei 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Remu Ransiki mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana, program, pengembangan kelembagaan dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
2. Penyusunan dan penyajian informasi Daerah Aliran Sungai.
3. Pengembangan model pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
4. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
5. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Struktur Organisasi

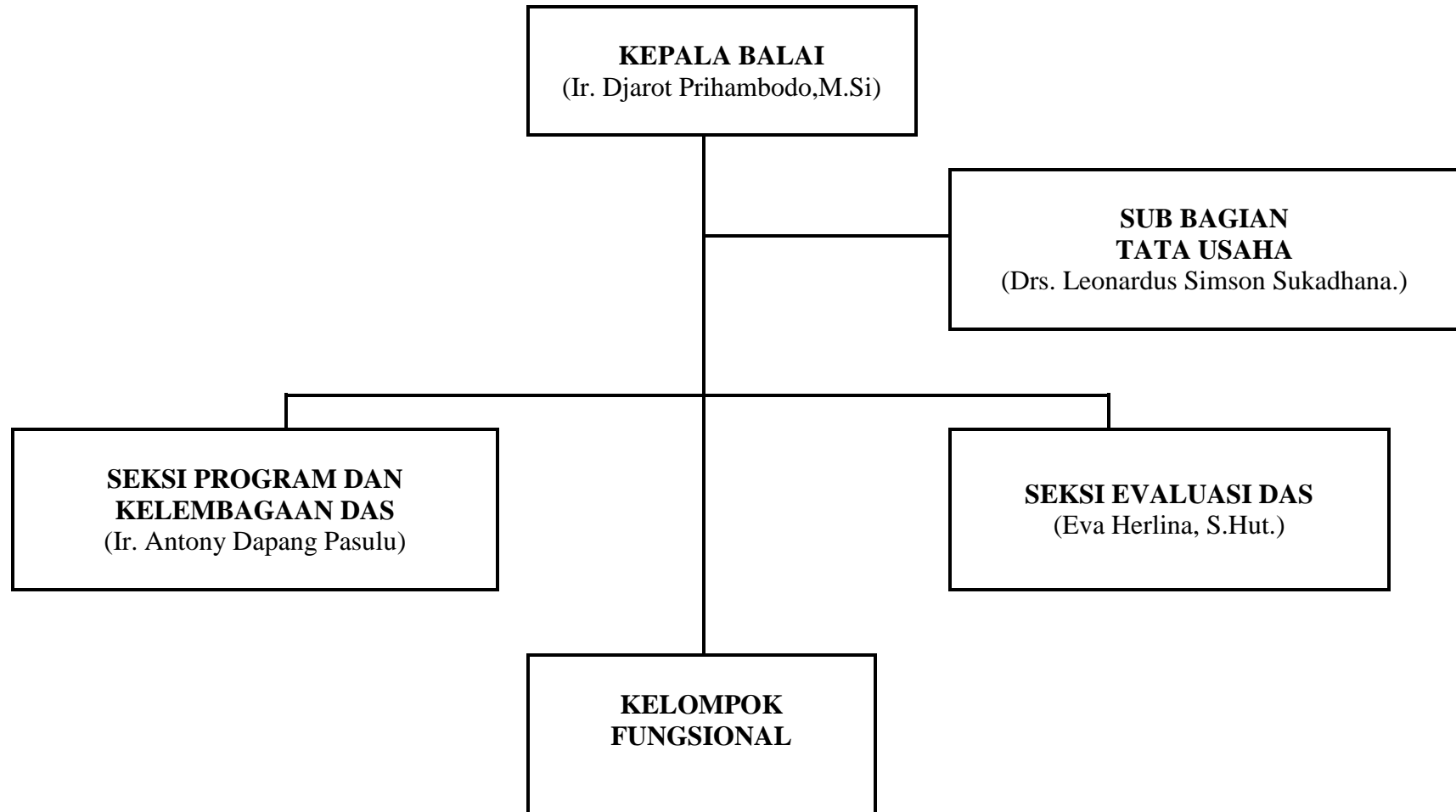
Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki berkedudukan di Manokwari merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDAS & HL). Kepala BPDAS secara fungsional dibina oleh para Direktur lingkup PDAS HL dan secara fungsional dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PDAS HL di Provinsi Papua Barat, dikoordinasikan oleh Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih Papua Barat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, BPDAS Remu Ransiki terdiri dari beberapa seksi/sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Program dan Kelembagaan DAS
- c. Seksi Evaluasi DAS
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki merupakan salah satu UPT di Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih bertipe B, dimana terdapat dua seksi/sub bagian, yaitu : seksi program dan kelembagaan serta seksi evaluasi. Untuk menuju ke BPDAS dengan tipe A perlu proses dan kemajuan kantor/UPT.

Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki Tahun 2015 adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPDAS Remu Ransiki Tahun 2015

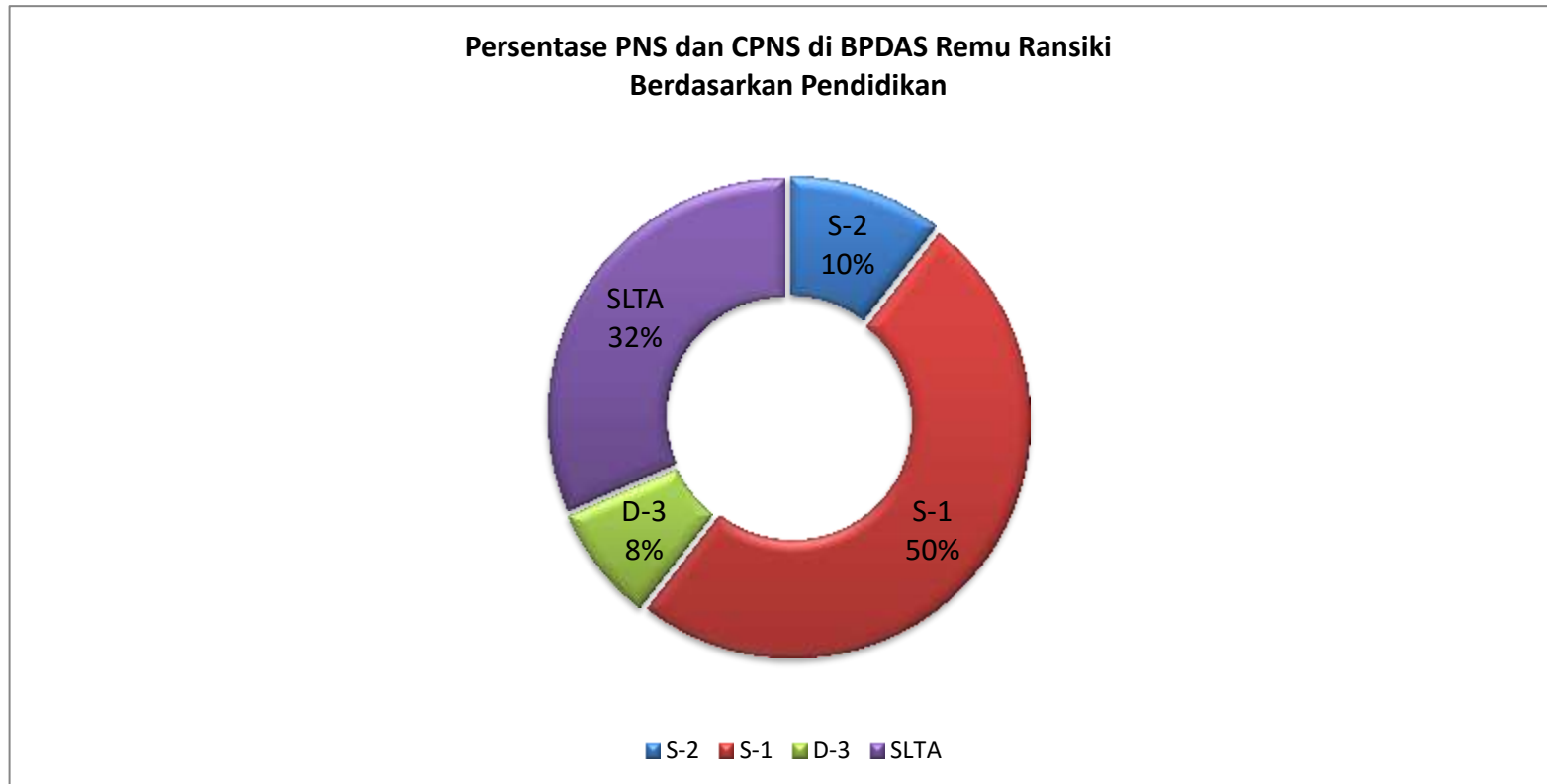
D. Sumber Daya Manusia

Personil BPDAS Remu Ransiki hingga akhir tahun 2015 berjumlah 45 orang yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang ber-status PNS, 11 (sebelas) orang ber-status CPNS dan 7 (tujuh) orang ber-status Tenaga Kontrak. Personil BPDAS Remu Ransiki juga memiliki heterogenitas baik dari umur, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Untuk itulah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan peningkatan kemampuan bagi seluruh pegawai. Untuk lebih jelasnya kondisi pegawai BPDAS Remu Ransiki dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Personil BPDAS Remu Ransiki Berdasarkan Golongan dan Teknis Pendidikan.

No.	Sub Bagian / Seksi	Golongan								Jumlah
		IV		III		II		I		
		Teknis	Non Teknis	Teknis	Non Teknis	Teknis	Non Teknis	Teknis	Non Teknis	
1	Kepala Balai	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Seksi Program & Kelembagaan DAS	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4	Kepala Seksi Evaluasi DAS	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5	Kelompok Fungsional Tertentu	-	-	6	2	7	-	-	-	15
6	Kelompok Fungsional Umum	-	-	12	2	2	3	-	-	19
Jumlah		1	-	20	5	9	3	-	-	38

Tingkat pendidikan pegawai BPDAS Remu Ransiki sangat bervariasi mulai dari SLTA 31,57%; D3 7,89 %; Sarjana 50%, dan Pasca Sarjana 10,53 %. Ke-depan diharapkan komposisi pegawai dapat berimbang antar tingkat pendidikan, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja BPDAS Remu Ransiki. Besaran persentase berdasarkan pendidikan di Balai Pengelolaan DAS Remu Ransiki dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Persentase Personil BPDAS Remu Ransiki Tahun 2015

III. KONDISI UMUM

A. Letak dan Luas

Provinsi Papua Barat merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Papua, tetapi yang menjadi wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki adalah Provinsi Papua Barat ditambah Provinsi Papua (Kab. Dogiyai, Kab. Mimika, dan Kab. Nabire) dengan luas wilayah mencapai 100.023 Km². Wilayah ini secara geografis terletak pada 1°4' LS – 4°18' LS dan 129°17" BT – 135°46" BT. Letak dan luas daratan masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Letak dan Luas Kabupaten/Kota di wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki.

No.	KABUPATEN/ KOTA	LUAS
1	Fakfak	983,548.33
2	Kaimana	1,656,033.20
3	Kota Sorong	35,073.74
4	Manokwari	807,744.00
5	Manokwari Selatan	213,745.43
6	Maybrat	552,793.56
7	Pegunungan Arfak	345,477.85
8	Raja Ampat	745,217.46
9	Sorong	798,044.38
10	Sorong Selatan	663,865.38
11	Tambora	506,470.31
12	Teluk Wondama	475,735.86
13	Teluk Bintuni	2,003,127.29
14	Dogiyai	26,207.30
15	Mimika	150,213.32
16	Nabire	60,243.89
TOTAL		10,023,541.30

B. Penggunaan dan Penutupan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki Tahun 2015 di dominasi oleh Hutan Lahan Kering Primer yakni seluas 5.439.381,04 Ha (54,27 %) lalu diikuti oleh Hutan Sekunder 2.389.865,94 Ha (23.84%) kemudian Hutan Rawa Primer dengan luas penutupan lahan 707.222,57 Ha (7,06%) dan sisanya berupa penutupan lahan lainnya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

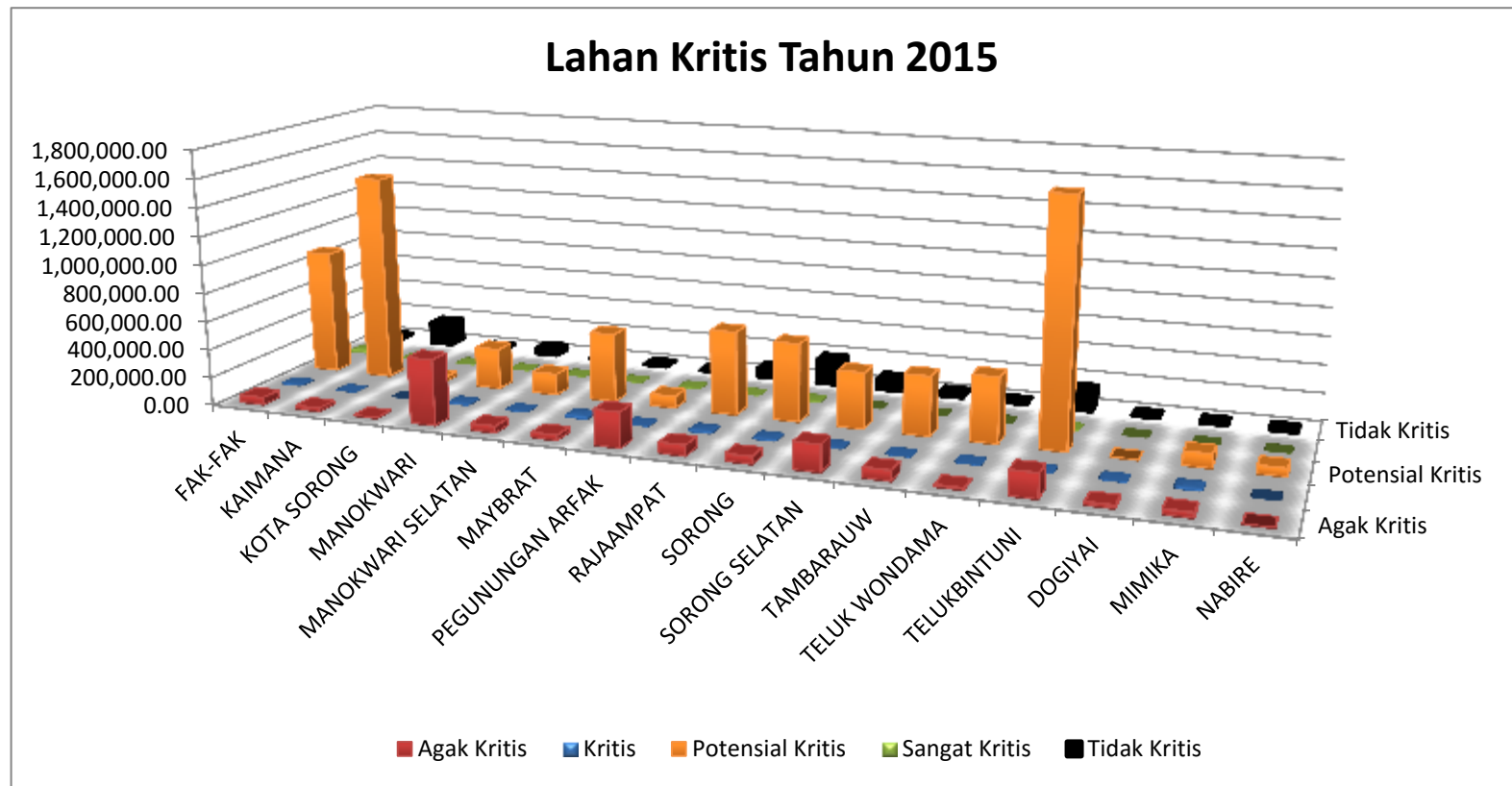
Tabel 3. Penggunaan Lahan di Wilayah Kerja BPDAS Remu Ransiki Tahun 2015

No	PENGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Bandara	269.21	0.00%
2	Hutan Lahan kering Primer	5,439,381.04	54.27%
3	Hutan Mangrove Primer	374,273.49	3.73%
4	Hutan Mangrove Sekunder	105,518.14	1.05%
5	Hutan Rawa Primer	707,222.57	7.06%
6	Hutan Rawa Sekunder	70,779.86	0.71%
7	Hutan Sekunder	2,389,865.94	23.84%
8	Perkebunan	44,602.88	0.44%
9	Pemukiman	18,667.73	0.19%
10	Pertambangan	9,124.15	0.09%
11	Pertanian Lahan Kering	6,582.54	0.07%
12	Pertanian Lahan Kering Campuran	112,986.64	1.13%
13	Rawa	6,600.15	0.07%
14	Rumput Kering dan Rumput Rawa	167,384.58	1.67%
15	Sawah	1,905.17	0.02%
16	Semak Belukar	368,978.37	3.68%
17	Semak Belukar Rawa	68,559.25	0.68%
18	Tanah	14,620.48	0.15%
19	Transmigrasi	10,191.07	0.10%
20	Tubuh Air	106,022.67	1.06%
	TOTAL	10,023,535.93	100 %

C. Kekritisan Lahan / DAS

Berdasarkan analisa SIG (Tahun 2013), luas lahan kritis di Wilayah Kerja BPDAS Remu Ransiki seluas 1.689.471 hektar. Angka tersebut lebih kecil dibanding analisis tahun-tahun sebelumnya (analisis tahun 2010 dan 2006) karena faktor peningkatan rehabilitasi lahan dan hutan dapat menurunkan laju degradasi hutan dan lahan yang cukup tinggi sehingga luas lahan kritis mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 Tingkat Kekritisan Lahan didominasi oleh lahan Potensial Kritis 7.636.987,56 Ha (76,19%), kemudian diikuti oleh lahan Agak Kritis 1,484,205.85 Ha (14,81%), lahan Tidak Kritis 698,760.76 Ha (6,97%), lahan Kritis 152.613,25 Ha (1,52%) dan lahan Sangat Kritis 50,976.14 Ha (0,51).

Grafik 1. Persentase Lahan Kritis berdasarkan Kekritisan Lahan di setiap Kabupaten di BPDAS Remu Ransiki Tahun 2015



Berdasarkan Grafik 1 di atas terlihat bahwa Daerah dengan tingkat kekritisan lahan Potensial Kritis paling tinggi terdapat di Kab. Teluk Bintuni yakni sebesar 1.689.162,20 (22.12 %), pada lahan Agak Kritis berada di Kab. Manokwari 460.588,50 Ha (31.03 %) , lahan Tidak Kritis paling tinggi terdapat pada Kab. Sorong 173.696,18 (24.86%), pada lahan kritis di Kab. Maybrat 24.312,16 Ha (15,93%) dan pada lahan Sangat Kritis paling tinggi terdapat di Kab. Sorong 173.696,18 (24,86). Untuk data lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.2.1.

Tingkat lahan Potensial Kritis dan Agak Kritis di wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki cukup tinggi, ini dapat menjadi nilai indikasi yang nantinya akan menjadi lahan kritis jika pembukaan lahan dan hutan dilakukan secara tidak bijaksana. Untuk itu perlu adanya pengawasan lanjutan untuk tetap menjaga dan menurunkan tingkat kekritisan lahan di Provinsi Papua Barat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya dengan terus melakukan rehabilitasi lahan, mengurangi kegiatan pertanian nomaden, dan menjaga hutan dari kegiatan-kegiatan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dari pembakaran hutan dan penebangan hutan secara ilegal.

D. Jenis Tanah dan Topografi

Diwilayah kerja BPDAS Remu Ransiki terdapat keberagaman jenis tanah (dapat dilihat pada Lampiran 1.10.2), dimana jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah Rendolls dengan luasan 2.513.450,83 Ha (26.37%), kemudian pada posisi kedua jenis tanah Tropudalf yakni sebesar 1.363.331,08 Ha (14.30%), dan kemudian diikuti oleh Tropohemist seluas 580.663,61 Ha (6.09%).

Tabel 4. Kelerengan Lahan di wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki

No	KABUPATEN / KOTA	KELERENGAN				
		0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>45%
1	Fakfak	577,921.30	68,751.37	19,593.31	287,622.40	25,411.63
2	Kaimana	581,906.73	59,504.99	134,708.98	209.63	872,618.49
3	Kota Sorong	8,450.67	18,466.30	7,859.66	0.00	237.81
4	Manokwari	106,318.57	16,475.77	43,606.14	97,872.03	543,283.84
5	Manokwari Selatan	54,555.26	12,891.91	32,782.65	30,920.07	82,503.15
6	Maybrat	258,244.92	201,091.36	14,170.97	37,536.32	41,749.98
7	Pegunungan Arfak	13,285.43	0.00	30,752.10	54,254.46	247,185.84
8	Raja Ampat	181,831.37	12,559.65	410,680.61	18,094.68	115,756.61
9	Sorong	587,209.14	86,244.10	27,236.52	30,946.16	64,739.33
10	Sorong Selatan	549,743.62	113,609.31	0.00	0.00	0.00
11	Tambraw	27,243.42	107,946.57	20,414.94	94,673.98	255,898.06
12	Teluk Wondama	89,883.20	16,808.28	0.00	160,721.97	203,555.99
13	Teluk Bintuni	1,199,776.41	85,119.72	147,883.76	268,461.91	300,842.41
14	Dogiyai	0.00	0.00	0.00	0.00	26,188.61
15	Mimika	52,326.67	0.00	0.00	0.00	97,852.59
16	Nabire	16,190.51	867.57	0.00	0.00	39,505.31
	TOTAL	4,304,887.22	800,336.90	889,689.64	1,081,313.61	2,917,329.65

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki memiliki keberagaman kelerengan. Dimana kelerengan 0-8% lebih mendominasi dengan luasan 4.304.887,22 Ha (43.08%) kemudian diikuti kelerengan >45% seluas 2.917.329,65 Ha (29.19%) dan 25-40%, 15-25% dan 8.01% dengan masing-masing luas kelerengan secara berurutan adalah 1,081,313.61 (10.82%), 889,689.64 (8.90%) dan 800,336.90 (8.01%).

IV. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PERHUTANAN SOSIAL LIMA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2011 S/D 2015)

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian DAS dan Hutan Lindung di wilayah provinsi Papua Barat dibiayai dari sumber dana DIPA (APBN), DAK-DR, DBH-DR serta APBD Kabupaten. Kegiatan PDASHL yang telah dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2011 s.d. 2015) merupakan kegiatan dalam pelayanan BPDAS Remu Ransiki dengan uraian sebagai berikut :

Kegiatan Program dan Kelembagaan DAS :

Tabel 5. Realisasi Kegiatan BPDAS Remu Ransiki 5 Tahun terakhir (2011-2015)

NO	KEGIATAN	SATUAN	TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	RHL kawasan lindung dan konservasi	Ha	5.000	5.000	3.000	1.000	400
2	Kebun Bibit Rakyat	Kelompok	123	128	150	60	15
3	Penanaman Bibit Hasil KBR	Batang	6.300.000	3.575.000	3.750.000	1.500.000	375.000
4	Hutan Kota	Ha	30	15	15	10	10
5	Hutan Desa	Ha	46.205,8	-	-	-	3.000
6	Forum DAS	Forum	1	1	-	-	-
7	Penyusunan rencana pengelolaan DAS Terpadu	DAS	1	1	-	-	-
8	BLM-PPMPBK	Kelompok	44	40	50	16	30
9	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Ha	500	-	1.000	-	-
10	Penghijauan Lingkungan	Batang	900.000	110.000	50.000	100.000	18.000

- Kegiatan pembangunan bidang PDASHL meliputi kegiatan program-kelembagaan DAS. Kegiatan program dan kelembagaan DAS berupa pembuatan tanaman rehabilitasi pada hutan lindung atau hutan konservasi, rehabilitasi hutan mangrove, pemeliharaan tahun I dan II, pembuatan hutan kota, pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), penanaman bibit KBR dan Penghijauan lingkungan (OBIT). Sedangkan

kegiatan pendukung berupa pengembangan kelembagaan, penyelenggaraan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi kegiatan RHL dan OBIT. Kegiatan evaluasi DAS yang dilakukan adalah Monitoring penggunaan lahan, tata air dan sosial ekonomi kelembagaan, Updating Data Potensi RHL, Updating Data SSOP banjir dan tanah longsor, Monitoring kejadian banjir dan tanah longsor, dan monev penilaian RHL.

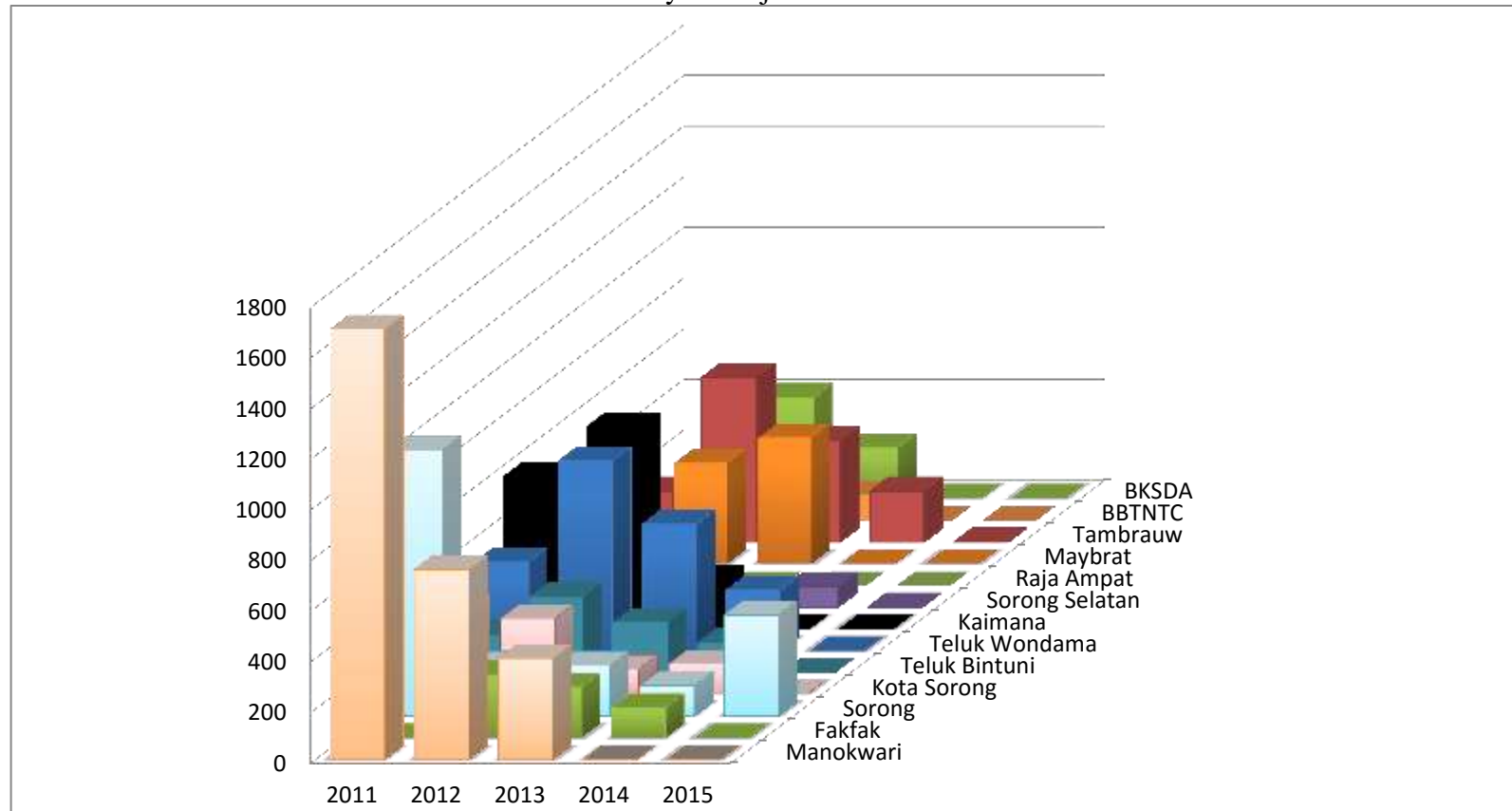
- Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Provinsi Papua Barat meliputi :
 - a. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2011 sebanyak 123 kelompok tani KBR
 - b. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2012 sebanyak 128 kelompok tani KBR
 - c. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2013 sebanyak 150 kelompok tani KBR
 - d. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2014 sebanyak 60 kelompok tani KBR
 - e. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2015 sebanyak 15 kelompok tani KBR

- Kegiatan Rehabilitasi Lahan di luar kawasan hutan yang dilaksanakan di provinsi Papua Barat selama 5 tahun terakhir meliputi
 - a. Pada Tahun 2011 terdapat pembangunan hutan kota seluas 30 ha, hutan desa seluas 20.000 ha dan di Kabupaten Fakfak, 26.205,80 ha di Kabupaten Kaimana.
 - b. Pada Tahun 2012 terdapat pembangunan hutan kota seluas 15 ha di Kabupaten Teluk Wondama.
 - c. Pada Tahun 2013 terdapat pembangunan hutan kota seluas 15 ha di Kabupaten Teluk Wondama, hutan desa 4.195 Ha di Kabupaten Sorong Selatan.
 - d. Pada Tahun 2014 terdapat pembangunan hutan kota seluas 10 ha di Kabupaten FakFak
 - e. Pada Tahun 2015 terdapat pembangunan hutan kota seluas 10 ha di Kabupaten Manokwari, hutan desa 3.000 Ha di Kabupaten Fakfak.

- Kegiatan Reboisasi di dalam kawasan hutan yang dilaksanakan di provinsi Papua Barat pada tahun 2011 – 2015 meliputi :
 - a. Kegiatan RHL Kawasan Lindung dan Konservasi Tahun 2011 seluas 5.000 hektar

- b. Kegiatan RHL Kawasan Lindung dan Konservasi Tahun 2012 seluas 5.000 hektar
- c. Kegiatan RHL Kawasan Lindung dan Konservasi Tahun 2013 seluas 3.000 hektar
- d. Kegiatan RHL Kawasan Lindung dan Konservasi Tahun 2014 seluas 1.000 hektar
- e. Kegiatan RHL Kawasan Lindung dan Konservasi Tahun 2015 seluas 400 hektar

Grafik 2. Reboisasi di Dalam Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPDAS Remu Ransiki Tahun 2011-2015



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk kegiatan reboisasi di dalam kawasan hutan semakin mengalami penurunan setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 hanya mencapai 40% dari tahun sebelumnya (Tahun 2014). Salah satu penyebab penurunan capaian

kegiatan ini adalah dikarenakan anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut relatif menurun dari tahun sebelumnya, sehingga BPDAS Remu Ransiki hanya dapat merealisasikan 400 Ha untuk kegiatan reboisasi di dalam kawasan hutan pada Tahun 2015. Kedepannya diharapkan adanya anggaran yang memadai untuk kegiatan reboisasi kawasan hutan, dengan harapan agar dapat menekan tingkat kekritisian lahan di wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki.

- Kegiatan Perhutanan Sosial atau kelembagaan di provinsi Papua Barat selama 5 tahun terakhir meliputi :
 - a. Kegiatan Lokakarya Pembentukan Forum DAS tahun 2011 yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong, kegiatan penyusunan rencana pengelolaan DAS Terpadu Tahun 2011 yang berlokasi di DAS Arui, Kabupaten Manokwari, kegiatan DAS Mikro/MDM Tahun 2011 yang berlokasi di DAS Prafi Kabupaten Manokwari seluas 1000 hektar berupa draft penyusunan naskah.
 - b. Kegiatan Lokakarya Pembentukan Forum DAS tahun 2012 yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong, kegiatan penyusunan rencana pengelolaan DAS Terpadu Tahun 2012 yang berlokasi di DAS Prafi, Kabupaten Manokwari, kegiatan DAS Mikro/MDM Tahun 2012 yang berlokasi di DAS Prafi Kabupaten Manokwari seluas 1000 hektar berupa penyusunan buku rencana pengelolaan DAS Mikro.

- Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konservasi (BLM-PPMPBK)/ Bansos.
 - a. Kegiatan BLM-PPMPBK/Bansos tahun 2011 di Provinsi Papua Barat dilaksanakan di Kabupaten Manokwari sebanyak 24 kelompok dan Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 20 kelompok.
 - b. Kegiatan BLM-PPMPBK/Bansos tahun 2012 di Provinsi Papua Barat dilaksanakan disemua kabupaten/kota dengan jumlah 40 kelompok.
 - c. Kegiatan BLM-PPMPBK/Bansos tahun 2013 di Provinsi Papua Barat dilaksanakan disemua kabupaten/kota dengan jumlah 50 kelompok.
 - d. Kegiatan BLM-PPMPBK/Bansos tahun 2014 di Provinsi Papua Barat dilaksanakan disemua kabupaten/kota dengan jumlah 16 kelompok.

- e. Kegiatan BLM-PPMPBK/Bansos tahun 2015 di Provinsi Papua Barat dilaksanakan disemua kabupaten/kota dengan jumlah 30 kelompok.

Kegiatan Evaluasi DAS :

- Kegiatan monev penggunaan lahan, tata air dan sosial ekonomi kelembagaan tahun 2012 berlokasi di SubDAS Warmare yang merupakan bagian dari DAS Prafi di Distrik Warmare dan SubDAS Arui di Distrik Masni Kabupaten Manokwari.
- Kegiatan monev penggunaan lahan, tata air dan sosial ekonomi kelembagaan tahun 2013 berlokasi di SubDAS Warmare yang merupakan bagian dari DAS Prafi di Distrik Warmare dan SubDAS Arui di Distrik Masni Kabupaten Manokwari serta di SubDAS Rufei di Distrik Sorong Barat
- Kegiatan monev penggunaan lahan, tata air dan sosial ekonomi kelembagaan tahun 2014 berlokasi di SubDAS Warmare yang merupakan bagian dari DAS Prafi di Distrik Warmare dan SubDAS Arui di Distrik Masni Kabupaten Manokwari serta di SubDAS Rufei di Distrik Sorong Barat
- Kegiatan monev penggunaan lahan, tata air dan sosial ekonomi kelembagaan tahun 2015 berlokasi di SubDAS Warmare yang merupakan bagian dari DAS Prafi di Distrik Warmare dan SubDAS Arui di Distrik Masni Kabupaten Manokwari serta di SubDAS Rufei di Distrik Sorong Barat
- Kegiatan Updating SSOP Banjir dan Tanah longsor tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 dilaksanakan di seluruh wilayah kerja BPDAS Remu Ransiki.
- Kegiatan Monev Updating Data Potensi RHL sumber dana DAK-Kehutanan, DBH DR, APBD dan APBN Tahun 2011 – 2015.
- Kegiatan Movev Reklamasi Tambang Tahun 2012 - 2014.
- Kegiatan Penilaian RHL Tahun 2011 – 2015.
- Kegiatan Monev Kejadian Banjir Tahun 2013 - 2015
- Kegiatan Updating Lahan Kritis Tahun 2013, Kegiatan penyusunan Urutan DAS Prioritas sebanyak 2616 DAS Tahun 2013, dan Kegiatan Penyusunan Karakteristik DAS Tahun 2013.

LAMPIRAN